



OTT

Pegawai Kontrak Akhirnya Dipecat

NEGARA - Inspektorat Kabupaten Jembrana belum memberi sanksi pada Ketut TT, 56, salah satu oknum pegawai Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli). Sanksi pemecatan hanya dilakukan pada Ida Bagus Putu CW, 22, salah satu pelaku yang masih berstatus pegawai kontrak.

Inspektur pada Inspektorat Jembrana Ni Wayan Koriani mengatakan, meski sempat tertunda karena terbentur hari libur sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Ketut TT. Bahkan rekomendasi sanksi sudah disiapkan dan akan diajukan pada pimpinan dalam hal ini Bupati Jembrana. "Belum bisa saya beritahu rekomendasi sanksinya," ujarnya.

Mengenai pelaku lain Ida Bagus Putu CW, 22, salah satu pelaku yang masih berstatus pegawai kontrak sudah diputuskan untuk dipecat beberapa waktu lalu. "Nanti kalau sudah ada keputusan apa sanksinya akan kami sampaikan," sebut dia.

Sementara itu mengenai sistem pungutan parkir di Terminal Gilimanuk pasca OTT oknum petugas pungut, Direktur Utama Perusda Jembrana Gusti Kade Kusuma Wijaya mengatakan tidak ada perubahan sistem pungutan. Hanya saja, petugas yang tertangkap tangan tidak dipekerjakan lagi. "Pungutan parkir tetap, kami tetap perketat pengawasan agar tidak terjadi lagi oknum melakukan pungli," tegasnya.

Selama proses pemeriksaan dan sanksi belum dikeluarkan Ketut TT dirumahkan, sehingga selama tidak bekerja dipastikan tidak mendapat gaji atau honor. "Karena tidak bekerja, pastinya tidak dapat (honor)," imbuhnya.

Mengenai sanksi, lanjutnya, dalam aturan Perusda sudah ada aturan mengenai sanksi yang ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan. Jika pelanggaran disiplin maka sanksinya peringatan. Apabila peringatan pertama tidak dihiraukan maka peringatan kedua dan pemecatan jika masih tetap membandel. Sanksi pemecatan tanpa peringatan lebih dulu berlaku pada pelanggaran hukum atau tersandung hukum lain. (bas/gup)

Edisi : Selasa, Kamis, 28 April 2017

Hal : 8 28



Tujuh Pejabat Akhirnya Diperiksa Jaksa

Terkait Dugaan Korupsi Terminal Manuver Gilimanuk

NEGARA - Dugaan korupsi Terminal Manuver Gilimanuk, memasuki babak baru. Kemarin (26/4), sejumlah pejabat struktural dari Dinas Perhubungan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jembrana, diperiksa secara bergiliran tim tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana.

Pantauan koran ini, Rabu pagi sejak Pukul 09.00. Sejumlah orang berseragam dinas perhubungan datang silih berganti ke kantor Kejari Jembrana Jalan Udayana, Negara. Mereka datang ke kantor korps Adhiyaksa untuk pemeriksaan terkait dugaan korupsi Terminal Manuver Gilimanuk.

Kasipidsus Kejari Jembrana I Made Pasek Budiawan saat dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan sejumlah pejabat struktural dinas yang sebelumnya

bernama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, terkait dugaan korupsi Terminal Manuver Gilimanuk." Ya, ini sedang pemeriksaan kasus itu (terminal manuver)," aku dia.

Pemeriksaan tersebut, penyelidikan tahap pertama setelah berkas hasil penyelidikan dilimpahkan seksi intelijen Kejari Jembrana untuk pendalaman keterangan saksi yang telah diperiksa penyelidikan sebelumnya. Total ada tujuh orang yang diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Selain pejabat dari dinas perhubungan, jaksa juga memeriksa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Jembrana I Dewa Gde Kusuma Antara. Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang saat ini menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, juga diagendakan untuk diperiksa pada tahap berikutnya.

Diberitakan sebelumnya, kebocoran retribusi Terminal Manuver Gilimanuk diselidiki Kejari Jembrana karena ada indikasi tindak pidana korupsi. Dugaan tindak pidana korupsi di Terminal Manuver Gilimanuk ini menyebabkan kerugian negara hingga ratusan

juta rupiah. Kerugian Negara tersebut terungkap dari hasil penghitungan jumlah karcis masuk terminal yang dikeluarkan dibandingkan dengan uang retribusi yang masuk ke kas daerah. Karcisnya banyak yang keluar, tetapi pendapat dari retribusi sedikit. (bas/gup)